

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP  
PENERTIBAN OLEH SATPOL PP**  
*(Studi: Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Barat Padang)*

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SELVI RAHAYU PUTRI**  
BP. 05191028



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2009**

## ABSTRAK

Selvi Rahayu Putri, 05191028. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Satpol PP (Studi : Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Barat Padang). Pembimbing I Prof. DR. Damsar, MA dan Pembimbing II Drs. Wahyu Pramono, M.Si.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya, termasuk di Kota Padang. Namun, keberadaan pedagang kaki lima tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan karena mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan kota. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Namun, kebijakan tersebut justru ditentang oleh pedagang sehingga setiap kali ditertibkan selalu ada resistensi dari para pedagang. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana resistensi pedagang kaki lima dalam menghadapi penertiban Satpol PP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima, mendeskripsikan penyebab pedagang kaki lima melakukan resistensi, dan mendeskripsikan pemecahan masalah dari resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban Satpol PP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (tidak berstruktur). Teori yang digunakan adalah Teori Konflik Randall Collins.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk resistensi secara umum dapat dibedakan atas dua yaitu resistensi kuat dan resistensi lemah. Resistensi kuat seperti menggunakan kekerasan, mengintimidasi petugas dengan senjata tajam, dan melakukan demonstrasi. Sedangkan resistensi lemah seperti main kucing-kucingan dengan petugas dan menebus barang dagangan yang telah disita serta mencari tempat yang sedikit tersembunyi untuk berjualan kembali. Resistensi yang kuat terjadi karena Pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan utama bagi mereka, penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP diikuti dengan penyitaan terhadap peralatan berdagang serta barang dagangannya, dan apabila petugas Satpol PP melakukan penertiban dengan menggunakan kekerasan dan main paksa terhadap pedagang. Solusi terbaik untuk memecahkan masalah resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban Satpol PP ini adalah adanya kebersamaan antara pemerintah dan pedagang untuk membuat konsep yang jelas dan terarah tentang penertiban. Proses penertiban yang dilakukan seharusnya diikuti dengan proses pembinaan terhadap pedagang serta penyediaan lahan yang sesuai untuk mereka dalam rangka melakukan aktivitas ekonominya. Artinya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus benar-benar adil dan tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I. 1 Latar Belakang**

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya. Bagi kalangan kelas bawah dan menengah, keberadaan pedagang kaki lima ini sangat dibutuhkan. Hubungan saling membutuhkan inilah yang semakin menyuburkan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Padang. Mengabaikan keberadaan pedagang kaki lima justru akan mempersulit pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaannya yang menjadi harapan masyarakat kelas bawah dan menengah sebagai lahan mencari nafkah, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional (Machdaliza, 2005:3).

Persoalan kehadiran pedagang kaki lima telah menimbulkan suatu dilema yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu ; disatu sisi pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan prestasi dalam kegiatan perdagangan yang perlu dipupuk dan dibina. Namun disisi lain, kita selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik, yaitu ketidakteraturan dan lingkungan yang kotor. Jika dilihat dari segi estetika lingkungan, maka keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. Kesemrawutan itu terjadi karena tenda maupun alat peraga yang digunakan untuk berjualan mayoritas ditinggal ditempat jualan. Tempat mereka berdagang di pinggiran jalan dengan memanfaatkan bahu jalan atau trotoar,

pasar dan terminal telah mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat ketidak disiplin para pedagang kaki lima dalam menggelar dagangannya.

Kehadiran para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian, seperti pasar dan terminal semakin sulit dibendung, karena bagaimanapun mereka harus tetap berdagang untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun telah ada usaha pemerintah secara langsung maupun tidak langsung seperti lokalisasi, penentuan tempat dan waktu usaha, pembangunan kios pasar, dan mencegah mereka berjualan di tempat umum.

Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Kota Padang juga telah mengeluarkan produk hukum daerah sebagai dasar atau pegangan dalam menata kehidupan yang harmonis, serta sebagai pegangan dalam mengatasi sekaligus memberikan sanksi atas pelanggaran yang secara langsung atau tidak telah mengganggu ketertiban umum.

Perda No.11/2005 merupakan salah satu bentuk aturan perundangan yang terdapat di kota Padang yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibum Ramas). Perda No.11/2005 ini juga merupakan landasan hukum bagi Satpol PP Kota Padang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) ini termasuk penertiban pedagang kaki lima yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1. Pasal tersebut melarang pedagang kaki lima membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu. Namun tempat khusus bagi pedagang kaki lima tidak dinyatakan secara jelas oleh pemerintah, sehingga tidak



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis data yang peneliti lakukan, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk resistensi secara umum dapat dibedakan atas dua yaitu resistensi kuat dan resistensi lemah. Resistensi kuat seperti menggunakan kekerasan, mengintimidasi petugas dengan senjata tajam, dan melakukan demonstrasi. Sedangkan resistensi lemah seperti main kucing-kucingan dengan petugas dan menebus barang dagangan yang telah disita serta mencari tempat yang sedikit tersembunyi untuk berjualan kembali. Melalui berbagai macam resistensi yang dilakukan, maka para pedagang berharap Pemerintah Kota mau melihat kepentingan mereka sebagai pelaku ekonomi yang berusaha mempertahankan hidup ditengah perkembangan dan kemajuan kota.
2. Resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap segala tekanan yang mereka terima dari Pemerintah Kota memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk mempertahankan eksistensi mereka. Para pedagang tidak hanya berusaha lepas dari tekanan namun juga berharap untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Resistensi yang kuat terjadi karena Pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan utama bagi mereka, Apabila penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di ikuti dengan penyitaan terhadap peralatan berdagang serta barang

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi* (edisi revisi). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Firdausy, Mulya Carunia. 1995. *Pengembangan Sektor Informal PKL Di Perkotaan*. Jakarta : Dewan Riset Nasional dan Bappenas.
- Hidayat. 1988. *Peranan dan Profil serta Prospek Perdagangan Eceran (Formal dan Informal) dalam pembangunan*. Jakarta : Prisma LP3ES No. 5.
- Molcong, J, Lexi. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya
- Manning, Chris dan T.N. Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Malang : INSPIRE.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*. Malang : INSPIRE.
- Pemkot. 2005. *Profil Daerah Kota Padang tahun 2005-2007*. Padang : Badan Peencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- Poloma, Margaret M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.